BAB II

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

A. Standar Akuntansi Keuangan Internasional

1. Konsep Dasar Standar Akuntansi Internasional

Pengertian IFRS dan Penggunaan IFRS secara Global menurut Warren, International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan seperangkat standar akuntansi global yang dikembangkan oleh International Accounting Standars Board (IASB) untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan. IASB merupakan badan independen yang membuat peraturan akuntansi. IASB tidak membuat peraturan akuntansi untuk suatu negara tertentu melainkan dengan membuat peraturan akuntansi yang dapat digunakan oleh berbagai negara dengan tujuan mengembangkan seperangkat standar akuntansi global. IFRS digunakan bagi perusahaan yang menerbitkan utang dagang dan surat berharga untuk ekuitas kepada public yang disebut perusahaan publik. Tujuan dilakukannya konvergensi IFRS yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta dapat meningkatkan arus investasi global melalui perbandingan laporan keuangan antar satu negara dengan negara lain. Menurut Warren, sejak tahun 2005, seluruh negara di Eropa (UE) telah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan IFRS. Selain itu, lebih dari 100 negara lainnya telah mengadopsi IFRS bagi perusahaan publiknya. Di Negara dengan ekonomi maju, Jepang sedang mempertimbangkan adopsi wajib pada tahun 2016, India memungkinkan penggunaan terbatas atas IFRS, dan China sedang mengonvergensikan standarnya dengan IFRS dari waktu ke waktu. Di Australia, entitas pemerintah lokal menunjukkan peningkatan signifikan pada liabilitas setelah penerapan IFRS. Hal yang sama terjadi di New

Zealand, rata-rata total aset, total liabilitas dan laba bersih lebih tinggi setelah dilakukan adopsi.[3]

Ada empat organisasi dunia yang menyusun standar akuntansi keuangan, yaitu diantaranya adalah Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC),Komisi Masyarakat Eropa (EC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC). Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), adalah lembaga terindependen dalam penyusunan standar akuntansi. Tujuan dari organisasi tersebut adalah mengembangkan serta memotivasi agar diterapkannya standar akuntansi global dengan kualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC) bertujuan untuk mengembangkan konsensus internasional, pertukaran informasi penyusunan standar baku untuk melindungi investor, dan pengawasan yang memadai dalam pasar modal. Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC) bertujuan untuk pengembangan profesi dan harmonisasi standar akuntan di seluruh dunia guna memberikan jasa yang konsisten dan memiliki kualitas yang tinggi guna kepentingan masyarakat (Choi, 1999). Standar Akuntansi Internasional oleh beberapa organisasi tersebut diharapkan dapat mengatur praktik-praktik akuntansi secara internasional. Pada kenyataanya tiap negara memiliki standar akuntansi yang berbeda satu sama lainnya, karena perbedaan latar belakang nasional, keunikan iklim bisnis, serta adanya perbedaan kebutuhan dari pemakai laporan keuangan.

Menurut Greuning, satu set laporan keuangan yang lengkap terdiri atas :

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
d. Laporan arus kas selama periode

[3] Intan Immanuel, *Adopsi Penuh dan Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional*, Jurnal Akuntansi Keuangan, 2004.

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika antitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2. Adopsi Penuh Standar Akuntansi Internasional

Adopsi penuh standar akuntansi internasional adalah mengadopsi standar akuntansi internasional secara penuh tanpa adanya perubahan-perubahan untuk diterapkan di suatu negara. Adopsi dan implementasi standar akuntansi internasional (IAS) yang sekarang menjadi International Financial Reporting Standard (IFRS) bukanlah suatu yang mudah, beberapa permasalahan akan dihadapi oleh tiap negara.

Permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah : 1) masalah penerjemahan standar itu sendiri, IFRS yang diterbitkan dalam bahasa Inggris perlu diterjemahkan, sedangkan penerjemahan itu sendiri akan mengalami kesulitan di antaranya adanya ketidak konsistenan dalam penggunaan kalimat bahasa Inggris, penggunaan istilah yang sama untuk menerangkan konsep yang berbeda, dan penggunaan istilah yang tidak terdapat padanannya dalam penerjemahan, 2) ketidaksesuaian antara IFRS dengan hukum nasional, karena pada beberapa negara standar akuntansi termasuk sebagai bagian dalam hukum nasional, sehingga standar akuntansinya ditulis dalam bahasa hukum, dan di sisi lain IFRS tidak ditulis dalam bahasa hukum, sehingga harus diubah oleh Dewan Standar Akuntansi masing-masing negara, 3) struktur dan kompleksitas standar internasional, dengan adanya IFRS menimbulkan kekhawatiran bahwa standar akan semakin tebal dan kompleks. Banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam mengadopsi IFRS bukan berarti mengadopsi IFRS tidak memiliki manfaat bagi negara yang mengadopsinya.

Manfaat dari adopsi penuh antara lain : penghematan waktu dan uang, dengan adanya IFRS perusahaan dapat melakukan konsolidasi informasi keuangan dari negara yang berbeda, tanpa memerlukan dua pegawai yaitu yang mengerti standar akuntansi Indonesia dan standar akuntansi negara lain, 2) dapat melindungi kepentingan masyarakat, karena dengan standar yang berbeda maka masyarakat yang mengharapkan keuntungan bisa jadi mengalami kerugian akibat perbedaan perlakuan akuntansi, 3) ekspansi ekonomi berlangsung dengan cepat, dengan standar yang sama maka laporan keuangan di semua negara akan sama, sehingga tidak perlu penyesuaian lagi dan proses analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan pengambilan keputusan juga lebih cepat, yang pada akhirnya proses ekspansi pun menjadi cepat.

3. Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional

Berbeda dengan adopsi penuh, harmonisasi standar akuntansi internasional memiliki sifat lebih fleksibel dan terbuka. Harmonisasi standar akuntansi internasional pertama kali dikenalkan oleh European Commision (EC). Pada tahun 1995 EC mengadopsi pendekatan baru bagi harmonisasi akuntansi yang memperbolehkan penggunaan standar akuntansi internasional untuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal internasional.

Lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar akuntnasi internasional antara lain adalah IASC (International Accountig Standard Commitee) dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Harmonisasi standar akuntansi internasional berarti proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi melalui penyusunan batasan berbagai macam perbedaan. Harmonisasi berarti dapat juga berarti sebagai sekelompok negara yang menyepkati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi

dengan standar yang disepakati bersama. Dengan demikian harmonisasi dapat mengakomodasi perbedaan nasional dan meningkatkan komparabilitas informasi keuangan dari berbagai negara. Harmonisasi membuat standar akuntansi keuangan sejalan dengan standar akuntansi internasional.

Pelaporan Keuangan Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal sebagai berikut: Neraca, Laporan laba rugi, Laporan usaha, Proposal atas penentuan penggunaan (apropriasi) laba ditahan, Skedul pendukung Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan undang-undang pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan Hukum Komersial ditambah dengan laporan arus kas

4. Adopsi dan Harmonisasi AIS/IFRS di Indonesia

Melakukan adopsi, harmonisasi, bahkan convergence (tidak harus serupa penuh tetapi kualitasnya di atas harmonisasi) ke IFRS merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari bagi negara-negara di dunia, serta menjadi perhatian pula bagi lembaga-lembaga di dunia seperti Bank Dunia, WTO dan lembaga lainnya. Termasuk Indonesia yang merupakan full member dari IFAC dan juga anggota dari WTO. Tanggapan Indonesia terhadap IFRS di bidang standar profesi, IAI mendukung harmonisasi standar akuntansi melalui adopsi dan adaptasi AIS. Pelaksanaan adopsi ke IFRS bagi tiap negara di dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, pelaksanaan adopsi dapat melalui beberapa tingkatan.

Tingkat/tahapan adopsi IFRS dapat dilakukan melalui lima tahap yaitu ,yaitu: 1) full adoption , yaitu mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkannya kata demi kata, 2) adapted , yaitu mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi di suatu negara, 3) piecemeal , yaitu mengadopsi sebagian nomor IFRS, nomor-nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja, 4) referenced , yaitu sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan

bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar, 5) not adoption at all , berarti suatu negara tidak mengadopsi IFRS sama sekali. Pada 8 Januari 2004 badan penyusun standar akuntansi di Indonesia yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) memutuskan membentuk dua tim untuk mengantisipasi penerapan secara penuh IFRS. Dua tim tersebut adalah Satuan Tugas untuk Full Adoption dan Satuan Tugas untuk Reformat PSAK. Satuan Tugas untuk Full Adoption melakukan penelitian atas seluruh Standar Laporan Keuangan Internasional (IFRS) guna tercapainya konvergensi, melakukan penelitian apakah seluruh paragraf aturan standard dalam IFRS harus diadopsi secara penuh mengingat adanya perbedaan lingkungan bisnis, sehingga belum tentu standar tersebut harmonis dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia, dan mencari masukan dari negara-negara anggota IFAC lainnya tentang sejauh mana pengadopsiannya terhadap IFRS. Satuan Tugas untuk Reformat PSAK melakukan tugas untuk penyempurnaan penyusunan PSAK serta penataan ulang terhadap penerbitan produk-produk PSAK pada waktu mendatang. Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, sedangkan pada format akan berubah tetapi tidak sampai mengubah substansi standar akuntansi keuangan. Adanya harmonisasi bahkan konvergensi terhadap IFRS diharapkan informasi akuntansi memiliki kualitas utama, yaitu komparabilitas atau dapat diperbandingkan dan relevansi. Kualitas tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan perbandingan laporan keuangan antara negara dan untuk pengambilan keputusan.

IFRS di Indonesia Menurut Warren, Indonesia secara resmi mengadopsi IFRS untuk perusahaan Indonesia sejak 2008 dan secara efektif diterapkan pada tahun 2012. Penerimaan luas yang diperoleh IFRS di seluruh dunia, bagaimanapun juga telah menempatkan tekanan besar pada Indonesia untuk menyelaraskan SAK dengan IFRS. Indonesia perlu mencapai konvergensi SAK dan IFRS. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan atas akuntansi dan pengungkapan keuangan untuk perusahaan publik Indonesia. OJK telah memperkenalkan peraturan dalam menyajikan laporan keuangan yang biasa disebut sebagai peraturan VIII.G.7. Dalam

peraturan tersebut, OJK mewajibkan perusahaan public untuk menerapkan SAK yang diterbitkan oleh DSAK. OJK dan DSAK memiliki kesepakatan bersama bahwa perusahaan publik Indonesia harus menerapkan SAK dan SAK akan dikonvergensikan ke IFRS. Salah satu keterbatasan utama dalam konvergensi adalah DSAK dan IASB terus beroperasi sebagai lembaga yang menetapkan standar akuntansi untuk yuridiksi masing-masing. Dengan demikian, konvergensi tidak akan menghasilkan satu set standar akuntansi global. Hanya standar yang melalui proses penetapan standar gabungan DSAK-IASB yang akan dirilis. Standar yang tidak melalui proses penetapan standar gabungan dapat Sebuah ringkasan singkat dari keputusan Indonesia yang utama yang berhubungan dengan IFRS diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Perjalanan menuju IFRS Tahun Proses 2008-2011 DSAK memutuskan untuk mengadopsi IFRS ke dalam SAK, mempersiapkan semua infrastruktur yang diperlukan seperti pendidikan dan pelatihan, peraturan, dan teknologi, mengantisipasi konsekuensi adopsi dari IFRS. Tahun 2011, menyelesaikan proses adopsi dan untuk menyelesaikan menyiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan. Tahun 2012, implementasi pertama dari SAK yang telah mengadopsi IFRS oleh perusahaan publik, mengevaluasi semua konsekuensi ekonomi dari adopsi IFRS. Tahun 2013-2015, meminimalkan perbedaan antara SAK dan IFRS secara bertahap, mendidik dan melatih perusahaan public yang terdaftar dalam pengelola dan mengantisipasi setiap revisi SAK.[4]

5. Ciri-ciri Standar Akuntansi Internasional

Menurut Martani, IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama sebagai berikut :

a. Principles-Based
   Standar yang menggunakan Principles-Based hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan

[4] Yenny Puspita Sari, *PEMAHAMAN MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA TERHADAP PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI INTERNASIONAL FINANCIAL REPORTING STANDAR (IFRS)*, Skripsi, 2015.

kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan standar yang rule based, memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Penyusunan laporan keuangan dapat merancang suatu transaksi sehingga dapat diakui secara akuntansi dan bukan melihat dari substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Namun, standar yang bersifat Principles-Based mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian (adjustment) yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.

b. Nilai wajar

Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (fair value). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaiaan pada nilai perolehan pertama (historical cost). Banyak pengakuan akuntansi saat ini yang dasar penilaiaannya masih menggunakan historical cost. IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak berwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehannya diyakini lebih reliable.

c. Pengungkapan

Mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan

akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen. Masalah dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Konvergensi IFRS

6. Masalah dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Konvergensi IFRS

Setiap negara menghadapi masalah dalam melaksanakan konvergensi standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Tetapi jenis dan bobot masalah dan tantangan yang dihadapi masing-masing Negara berbeda-beda. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Australia, Jepang, dan Indonesia berbeda. Menurut Kartikahadi, dkk (2012:27) permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain sebagai berikut :

a. Ketidakstabilan nilai rupiah
   Sehubungan dengan nilai rupiah yang cenderung lemah di pasar valuta asing, dan sering kali tidak stabil, maka perubahan IAS 21 the effects of changes in foreign exchange rates mendekati FABS akan mempunyai dampak serius dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang sarat exposure valuta asing, terutama bila terjadi devaluasi atau depresiasi rupiah secara serius, seperti kejadian di tahun 1978, 1983, 1986, 1997
b. Landasan hukum yang berbeda
   Aspek hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di suatu Negara sering kali merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam mengadopsi suatu standar akuntansi.
c. Profesi penunjang lain yang belum berkembang setaraf internasional Pengapliasian beberapa standar akuntansi memerlukan dukungan dari profesi penunjang lain (penilai, aktuaris, dll) yang setaraf dengan Negaramaju.
d. Frekuensi perubahan IFRS IASB relatif sering melakukan revisi atas standar yang dikeluarkannya. Setiap standar akuntansi perlu dipahami secara jelas sebelum diterapkan.

Standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan seringkali terdapat kendalan dikerenakan sulitnya menemukan

terjemahan yang sesuai, konsistensi penggunaan terjemahan, penggunaan suatu istilah untuk penerapan konsep yang berbeda. Selain itu kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS juga menjadi suatu hambatan. Perguruan tinggi merupakan salah satu tempat yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan IFRS. Oleh karena itu, perguruan tinggi mempunyai peran dalam proses konvergensi IFRS.

B. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

1. Konsep Dasar SAK ETAP

SAK ETAP ialah suatu standar keuangan dengan tujuan supaya dipergunakan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, perusahaan tersebut tidak terikat kewajiban untuk mnerbitkan laporan keuangan dengan memplublikasikannya pada umum dan tidak mempunyai akuntabilitas publik secara berkelanjutan. SAK ETAP diadopsi dari IFRS yang didalamnya terdapat susunan laporan keuangan yang telah menjadi ketentuan yang baku untuk memudahkan entitas saat penyusunan laporan keuangan yang dapat menunjukkan informasi untuk pihak intern ataupun ekstern.[5]

Seperti yang penjelasan dari IAI bahwa SAK ETAP pada dasarnya hanya dipergunakan bagi perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang berkelanjutan selain itu untuk menerbitkan laporan keuangan untuk publik yang dikhususkan untuk pihak ekstern.[6]

SAK ETAP memiliki bertujuan agar terciptanya penerapan yang fleksibel dan kemudahan-kemudahan dalam akses Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada pembiayaan dari prbankan. SAK ETAP adalah SAK yang brdiri sendiri, SAK ini sama sekali tidak berlandas kepada SAK Umum, sebagaimana di dalamnya lebih banyak mempergunakan konsep biaya historis, mengatur segala transaksi pada ETAP, perlakuan atau peraturan yang lebih mudah dalam pembukuan akuntansi dan cenderung tetap atau tidak terjadi perubahan dalam waktu yang lama.

---

[5] Lilya Andriani dkk, *Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon),* JIMAT, vol 02, 2014, no.01.

[6] Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* , (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan 2016)

Tujuan dari SAK ETAP adalah memudahkan dan menyelesaikan semua kendala atas diterapkannya PSAK umum pada perusahaan yang tida mempunyai akuntabilitas publik. Selain itu tujuan SAK ETAP adalah untuk menyediakan semua sesuatu dalam pelaporan yang dibutuhkan entitas tanpa akuntabilitas publik. Hal tersebut menjadi dasar bahwa harus diterapkannya SAK ETAP dalam pelaporan pada perusahaan yang tidak mempunyai akuntabilitas publik. [7]

Di adakannya SAK ETAP adalah untuk dijadikan penyelesaian/solusi bagi perusahaan yang tidak mempunyai akuntabilitas publik. ETAP merupakan sebuah entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik secara berkelanjutan serta laporan keuangan diterbitkan hanya teruntuk tujuan umum bagi para pemakai luar misalnya peminjam modal dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas kecil hingga menengah dapat membuat laporan keuangannya masing-masing serta dapat diaudit, dan memperoleh pendapat audit, yang nantinya dapat digunakan sebagai pengembangan usaha. Entitas bisnis yang termasuk ke dalam klarifikasi entitas tanpa akuntabilitas publik antara lain adalah perorangan, Firma, Comanditaire Vetnootschap (CV), dan Perseroan Terbatas (PT) yang tidak memilki akuntabilitas publik yang signifikan, serta Koperasi.[8]

2. Ruang Lingkup SAK ETAP

SAK ETAP dimaksudkan untuk dipergunakan entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik, entitas tersebut diantaranya adalah :

a. Tidak mempunyai akuntabilitas yang sifnifikan, yaitu tidak memiliki kewajiban secara terus menerus untuk menerbitkan laporan keuangan bagi publik
b. Laporan keuangan diterbitkan untuk keperluan umum teruntuk pihak luar. Contoh pemakai eksternal yaitu pemilik namun tidak tersangkut secara langsung didalam tata kelola usaha, dan kreditur, serta lembaga pemeringkat kredit.

[7] Raven Pardomuan Siagian dan Sifrid S. Pangemanan, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go,* EMBA, vol 04, 2016, no.01.

[8] Syaiful Bahri, 2016, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2016), hlm.7.

Sedangkan entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang berkelanjutan apabila :

a. Entitas yang sudah mengajukan pendaftaran diri, ataupun yang masih proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal maupun regulator lain yang bertujuan untuk menerbitkan efek di pasar modal
b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sebagian besar masyarakat.[9]

3. Prinsip-prisip Laporan Keuangan

Krieria dalam pengakuan dan pengukuran harta, dan kewajiban, pendapatan serta beban pada SAK ETAP dilandaskan dari prnsip pervasif pada Kerangka Dasar Penyajian serta Pengukuran Laporan Keuangan (KDPPLK). Prinsip pervasif merupakan suatu prinsip yang mewajibkan perusahaan mempraktikkan pertimbangan akuntansi yang menciptakan laporan keuangan yang andal serta relevan. Prinsip pervasif dibutuhkan dalam membuat pertimbangan terhadap perlakuan akuntansi atas sesuatu transaksi, kejadian ataupun keadaan yang lain yang tidak secara khusus diatur dalam SAK ETAP. Pada keadaan tersebut hingga entitas wajib memakai pertimbangan yang menciptakan data yang andal serta relevan.

Dalam konsep dan prinsip pervasif SAK ETAP mengatur prinsip pengakuan serta pengukuran umum , merupakan pos yang mendapat pengakuan sebagai harta, kewajiban, pendapatan, dan beban jika kriteria tersebut telah terpenuhi maka :

a. Ada kemungkinan bahwa kegunaan ekonomi yang berhubungan dengan pos tersebut akan menyalur dari dalam entitas.
b. Pos tersebut memiliki biaya yang dpat diperhitungkan dengan andal. Pengukuran merupakan suatu proses dari penetapan total uang yang dipergunakan perusahaan untuk mmengukur harta, kwajiban, dan pendapatan, serta beban didalam laporan keuangan. Proses tersebut termasuk memilah landasan pengukur tertentu

[9] Raven Pardomuan Siagian dan Sifrid S. Pangemanan, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go,* EMBA, vol 04, 2016, no.01.

dan landasan pengukur yang umum yaitu biaya historis dan nilaiwajar. [10]

4. Penyajian Laporan Keuangan

Posisi keuangan, kinerja keuangan serta arus kas disajikan secara wajar pada laporan keuangan. Penyajian yang jujur dari suatu transaksi atau peristiwa diperlukan sebagai syarat untuk penyajian wajar yang disesuaikan dngan definisi serta kriteria pengakuan harta, kewajiban, pendapatan dan beban. Laporann keuangan wajar yang meliputi kinerja keuangan, posisi keuangan serta arus kas merupakan hasil atas diterapkannya SAK ETAP yang disertai dngan ungkapan tambahan sesuai kebutuhan. Pengungkapan tambahan perlu ditambahkan jika ada persyaratan yang belum disesuaikan dngan SAK ETAP bagi pengguna agar lebih mudah memahami dampak dari peristiwa, transaksi dan kondisi tertentu dalam suatu posisi keuangan serta kinerja keuangan dari suatu entitas.[11]

5. Pengguna Laporan Keuangan

a. Pengguna Laporan Keuangan

Pemilik Perusahaan

Bagi pengguna laporan keuangan dimaksudkan untuk:

1. memperhitungkan prestasi ataupun hasil yang diperoleh manajemen
2. mengenali deviden yang hendak diterima
3. memperhitungkan posisis keuangan industri serta pertumbuhannya
4. mengenali nilai saham serta laba per lembar saham
5. selaku dasar buat memprediksi keadaan industri pada waktu mendatang.

[10] Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS (edisi III)*,(Malang : Penerbit Andi,2020) , hlm.24.

[11] Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, (Yogyakarta:CV ANDI OFFSET, 2016), hlm.136

6. selaku dasar buat memikirkan, menaikkan ataupun kurangi investasi.

b. Manajemen Perusahaan

Untuk manjemen industri laporan keuangan tersebut dipergunakan untuk :

1) mempertanggungjwabkan tata kelola pada pemilik
2) mengukur tingkatan bayaran dari tiap aktivitas pembedahan industri, devisi, bagian, ataupun segmen tertentu.
3) mengukur tingkatan efisiensi serta tingkatan keuntungan industri, devisi, bagian serta segmen
4) memperhitungkan hasil kerja orang yang diberikan tugas serta tanggungjawab
5) untuk dijadikan pertimbangan dalam memastikan butuh tidaknya kebijakan baru.
6) memenuhi syarat didalam UU, peraturan, angaran dasar, pasar modal.

c. Investor

Untuk investor laporan keuangan dimaksudkkan buat:

1) memperhitungkan keadaan keuangan serta hasil usaha perusahaan
2) memperhitungkan mungkin menanamkan dana dalam perusahaan
3) memperhitungkan mungkin divestasi (menarik investasi) dari perusahaan
4) jadi dasar memprediksi keadaan industri pada waktu mendatang.

d. Kreditur serta Banker

Untuk kreditur, banker serta supplier laporan keuangan digunakan untuk:

1) memperhitungkan keadaan keuangan serta hasil usaha industri baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang
2) memperhitungkan mutu jaminan kredit/investasi buat menopang kredit yang hendak diberikan
3) memandang serta memprediksi prospek keuntungan yang bisa jadi diperoleh dari industri ataupun memperhitungkan rate of return perusahaan

4) memperhitungkan keahlian likuiditas, solvabilitas, rentabilitas industri selaku dasar dalam pertimbangan keputusan kredit.
5) memperhitungkan sepanjang mana industri menjajaki perjanjian kredit yang telah disepakati

e. Pemerintah serta Regulator

Untuk Pemerintah ataupun Regulator laporan keuangan dimaksudkan buat:

1) menghitung serta menetapkan jumlah pajak yang wajib dibayar
2) selaku dasar dalam penetapan kebijakan baru
3) memperhitungkan apakah industri membutuhkan dorongan ataupun aksi lain
4) memperhitungkan kepatuhan industri terhadap ketentuan yang ditetapkan
5) untuk lembaga pemerintah yang lain bisa jadi bahan penataan informasi statistik.

f. Analis, Akademis, Pusat Informasi Bisnis

Para analis, akademis serta lembaga-lembaga pengumpul informasi bisnis perihal ini berarti selaku bahan ataupun sumber data primer yang hendak diolah sehingga menciptakan data yang berguna untuk analisa, ilmu pengetahuan serta komoditi data.[12]

6. Penyusunan Laporan keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan yang berdasar pada SAK ETAP yaitu :

a. Nomor Akun (Rekening)

Kode Rekening difungsikan untuk memudahkan pencatatan data yang nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan pada laporan keuangan.

b. Pencatatan transaksi kedalam jurnal

Data yang telah terkumpul kemudian dicatat ke dalam jurnal kusus. Jurnal kusus merupakan buku jurnal yang dipergunakan untuk mencatat masing-masing transaksi sesuai jenisnya

[12] Maria Widyatuti, 2017, Analisa Kritis Laporan Keuangan, (Surabaya:Jakad Media Publishing), hlm.4-7.

c. Memposting jurnal ke buku besar
   Yaitu proses penggolongan rekening yang sejenis kedalam buku besar. Buku besar adalah suatu alat yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan
d. Menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian
   Yaitu proses pemindahan setiap saldo akun yang ada di buku besar kemudian dimasukkan dalam daftar saldo
e. Membuat ayat jurnal penyesuaian
   Yaitu proses penyesuaian beberapa akun yang perlu untuk disesuaiakan agar dapat diketahui nilai sebenarnya. Akun-akun yang dimaksud misalnya biaya dibayar dimuka, penyusutan, dan lain-lain.[13]
f. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian
   Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo yang ada pada buku besar yang telah disesuaikan dengannilai sesungguhnya
g. Menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP
   Laporan keuangan tersebut antara lain adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
h. Membuat jurnal penutup
   Yaitu proses penjurnalan beberapa saldo akun nominal yang nanti saldonya akan di nolkan.[14]
i. Menyusun neraca saldo setelah penutup
   Yaitu proses pencatatan beberapa saldo sesudah penutupan yang berada di buku besar. Saldo dari masing-masing akun trsebut nantinya akan mnjadi saldo awal pada periode selanjutnya.

7. Manfaat Penerapan SAK ETAP

   Penerapan SAK ETAP mempunyai manfaat, antara lain :[15]
   Dengan diadakannya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat :

[13] Susanto dkk, Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT.XYZ, Jurnal Politeknik Caltex Riau, Vol.13, 2020, No.1.

[14] Ibid, Vol.13, No.1

[15] Irwan Prasetia Prasertia, Tinjauan Atas Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada PT. Deltra Wijaya Konsultan, Unikom, 2018.

a. Membuat peyusunan laporan keuangan sendiri
b. Dapat di audit dan memperoleh pendapat dari audit, hingga dapat mempergunakan laporan keuangan tersebut untuk memperoleh pendanaan untuk menunjang perkembangan usaha.
c. Mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha
d. Lebih mudah dari pada PSAK-IFRS shingga penerpannya pun juga lebih mudah.
e. Dapat dipastikan informasi yang diberikan dalam laporan keuangan tersebut handal.

8. Badan Usaha yang Tergolong Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (menurut badan hukumnya)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditujukan untuk dipergunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang dimaksud ETAP ialah entitas sebagai berikut :

a. Tidak mempunyai akuntabilitas publik yang berkelanjutan
b. Laporan keuangan diterbitkan untuk tujuan umum yaitu ditujukan bagi para pemakai eksternal.

Badan usaha yang tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik menurut badan hukumnya adalah :

a. Perusahaan Perseorangan
   Perusahaan perorangan merupakan entitas yang dikuasai dan dioperasikan hanya 1 orang yang bertanggungjawab penuh dengan semua resiko yang ada pada perusahaan, dapat dikatakan pemilik dari perusahaan tersebut sekaligus berlaku sebagai pimpinan perusahaan. Badan usaha perseorangan dapat berbentuk :
   1) Perusahaan dagang, seperti toko swalayan, toko elektronika, atau restoran.
   2) Perusahaan jasa, seperti salon kencantikan, biro konsultan, atau bengkel.

3) Perusahaan industri, seperti industri batik, kerajinan perak atau mebel. [16]

b. Firma (Fa)

Firma adalah salah satu bentuk perusahaan persekutuan yang didirikan bersama-sama terdiri dari dua orang bahkan lebih untuk mengoperasikan perusahaan dengan nama bersama, semua anggota persekutuan berperan aktif dalam menjalankan usaha bisnisnya dan memiliki tanggungjawab atas segala resiko yang ada di perusahaan. Semua sekutu dikatagorikan sebagai pemilik yang merangkap menjadi pemimpin perusahaan. Mereka berhak bertindak atas nama firma dengan resiko dipertanggungjawabkan bersama dengan tidak ada batasan, yaitu bertanggungjawab penuh terhadap pihak ketiga sampai hak milik pribadi menjadi tanggungan atas utang-utang perusahaan. Tanggungjawab ini sering disebut dengan tanggungjawab solider. Karena pertanggungjawaban yang tidak terbatas tersebut, sekutu firma biasanya tidak banyak, yaitu terdiri atas orang-orang yang saling mengenal.

c. Perusahaan komanditer/CV (Comanditaire Vennotchaap)

CV adalah salah satu bentuk persekutuan yang anggotanya terdiri dari sekutu pekerja/aktif yang aktif menjalankan usaha dengan tanggungjawab penuh, dan sekutu diam/comanditaire yang hanya menyetorkan modalnya tanpa ikut aktif menjalankan usaha dengan tanggungjawab terbatas.

d. Perseroan Terbatas/PT

PT adalah suatu badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham yang sama besar dan tiap persero boleh memiliki lebih dari satu saham. Jadi saham merupakan surat tanda ikut serta dalam perusahaan yang berbentuk PT.

e. Koperasi

Koperasi merupakan bentuk usaha yang anggotanya terdiri dari orang-orang/badan hukum yang kegiatannya dengan

[16] Eeng Ahmad dan Epi Indriani, Ek*onomi dan Akuntansi : Membina Kompetensi Ekonomi* , (PT Grafindo Media Pratama, 2007), hlm.101.

berlandaskan berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai salah satu gerakan ekonomi rakyat dengan berdasar pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan koperasi ditetapkan dalam UUD No. 25 tahun 1992 pasal 2. Hal tersebut sesuai dngan penegasan yang ada pada ayat 1 pasal 33 UUD.

Sebagaimana UU No. 25 tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan utama koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota khususnya dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya, dan ikut serta membangun tatanan dalam perekonomian nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan maju berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Ada 3 hal yang menjadi tujuan dari koperasi Indonesia yaitu :

1) Untuk mensejahterakan para anggota
   Tujuan khusus didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan para anggotanya dengan azas tolong menolong.
2) Untuk mensejahterakan masyarakat
   Koperasi memiliki tujuan umum untuk mensejahterakan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial.
3) Berpartisipasi dalam memajukan tatanan ekonomi nasional, yang termasuk usaha bersama-sama berdasarkan pada azaz kekeluargaan serta demokrasi perekonomian

9. Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP

Kendala yang kerap dihadapi oleh para pengusaha didalam menyusun laporan keuangannya ialah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya akuntansi terhadap penyusunan pada laporan keuangan dan kurangnnya pendalaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta jarag diadakannya penyuluhan pelatihan penyusnan laporan keuangan. Tingkat pendidikan pelaku bisnis memang berpengaruh sekali didalam menentukan kualitas laporan keuangan. Pengetahuan tentang akuntansi

memiliki pengaruh yang berkelanjutan trhadap kualitas laporan keuangan.[17]

Selain hal itu yang menjadi kendala lainnya adalah keterbatasan waktu dan biaya. Waktu, disebabkan karena kebanyakan pengusaha tidak secara rutin menyusun laporan keuangannya, dan untuk masalah biaya disebabkan keharusan untuk mengeluarkan biaya lebih untuk mempergunakan jasa ahli yang bertugas menyusun laporan keuangan usahannya. Rendahnya tingkat pemanfaatan informasi akntansi dan penyelenggaraan disebabkan anggapan bahwa kurang pentingnya informasi akuntansi, pengetahuan, dan akunatnsi pemilik ataupun karyawan, serta pertimbangan biaya dan manfaat. Umumnya pengusaha-pengusaha tersebut kurang menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangn yang berlaku. Kemampuan dan pengetahuan dalam tata kelola pencatatan akuntansi secara baik dan benar berdasarkan pembukuan yang teratur, baik dalami bentuk harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya masih rendah oleh karena itu banyak pengusaha yang blum paham mengenai pentingnya pencatatan dan pembukuan untuk kelangsungan usahanya. [18]

a. Latar belakang pendidikan yang tidak mengenal mengenai akuntansi atau tata buku
b. Kurangnya disiplin dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi
c. Kurangnya dana untuk membayar tenaga kerja ahli atau membelli software akuntansi agar lebih mudah dalam proses pembukuan akuntansi.
d. Keefektifan sosialisasi yang belum memadai dari pihak yang berkompeten tentang SAK ETAP.[19]

Keterbatasan laporan keuangan menurut Munawir :

[17]. Yuli Setiawan dan Sigit Hermawan, *Persepsi Pemilik dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Atas Penusunan Laporan Keuangan,Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.3, 2018, No.2.

[18] Ibid, Vol.3, No. 2.

[19] Ade astalia dkk, *Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT.Nichindo Manado Suisan*, Junal EMBA, Vol.2, 2014, No.3.

a. Dasar dari laporan keuangan yang dibuat secara periodik ialah interim report (laporan yang pembuatannya di waktu terkait yang bersifat sementara) dan bukan termasuk laporan final.
b. Laporan keuangan memperlihatkan nominal dalam rupiah yang sifatnya terlihat pasti dan sesuai, namun kebenarannya bahwa dasar penyusunan dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah
c. Laporan keuangan penyusunannya, berdasarkan pada hasil dari pencatatan transakisi keuangan maupun nilai rupiah dari berbagai waktu maupun tanggal yang telah lalu.
d. Laporan keuangam tidak menunjukkan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap posisi keuangan entitas dikarenakan berbagai faktor tersebut tidak dapat dinnyatakan dalam satuan rupiah.

C. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah

1. Konsep Dasar SAK EMKM

Standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) adalah pedoman dalam penyusuana keuangan usaha mikro keci dan menengah ,agar mudah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara sederhana. SAK EMKM ditujukan untuk usaha kecil dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar penyusunann laporan keungan yang berada di indonesia. Standar ini juga merupakan standar penyusunan keuangan yang telah memenuhi kriteria dalam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya standar baru ini, dan dengan disahkan SAK EMKM. Di Indonesia, mempunyai tiga standar akuntansi keuangan yang ada, yaitu IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM, ketiganya merupakan standar yang digunakan untuk mendukung pelaporan keuangan yang sesuai ketentuan yang berlaku. SAK EMKM yang disusun oleh IAI yang bertujuan untuk entitas kecil dan menengah sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar terlebih dahulu harus ada pembenahan sistem dari dalam perusahaan itu sendiri, karena sistem yang bagus akan memudahkan dalam penerapan dan kenyataanya. Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah ("Exposure Draft SAK EMKM") dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku efektif 1 Januari 2018. Exposure Draft SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Diterbitkannya SAK EMKM bertujuan untuk implementasikan pada entitas mikro, kecil, dan menengah (tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun kriterianya yaitu :

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    1. Kriteria dari usaha mikro adalah sebagai berikut:
       Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
    2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
       Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). [20]
    3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
       Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

[20] Ketut Ari Warsadi dkk, *PENERAPAN PENUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAN PADA PT. MAMA JAYA*, e-Journal S1 Ak, Vol.8, 2017, No.2.

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, serta ayat (3) huruf a, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden Penerapan pencatatan keuangan pada UKM yang sesuai dengan SAK EMKM memberikan manfaat yang maksimal bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan. Manfaat yang dihasilkan dalam pencatatan keuangan pada UKM yang dilaksanakan dengan benar dan berbasis SAK EMKM akan memberikan manfaat, yaitu :

a. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, hutang serta modal yang dikenal dengan Neraca (Balance Sheet).
b. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan, biaya serta laba atau rugi yang diperoleh yang dikenal dengan Laporan Laba Rugi (Income Statement). Setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang satu dengan lainnya namun saling berkaitan karena mencerminkan aspek yang berbeda dari transaksitransaksi atau peristiwa-peristiwa lain yang sama. Selama ini pelaku UKM PT. Mama Jaya, memang belum pernah mendapat pelatihan penyusunan Laporan laba rugi.

   Penyebab tidak diterapkannya pencatatan keuangan yang berbasis SAK EMKM yaitu kurangnya pengetahuan pemilik dengan adanya SAK EMKM. Penyebab tidak diterapkannya pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM adalah selain kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi juga tidak adanya pengendalian sosial sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan keuangan untuk menerapkan pencatatan

sesuai dengan standar yang berlaku di umum, dan seharusnya UKM sudah mengacu pada SAK EMKM.

3. Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Dalam SAK EMKM laporan keuangan harus terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan

laporan posisi keuangan atau dalam kata lain neraca yaitu memuat sejumah informasi terkait harta, hutang, modal dan hasil laba/ rugi perusahaan dalam periode tertentu

2. Laporan Laba Rugi

Dalam laporan ini menyajikan hasil dari kegiatan operasional entitas pada bulan/ tahun sesuai kebijakan perusahaan . Laporan ini juga menyediakan infornasi terkait, laba/ hasil usaha biaya/ beban, baik biaya operasional ataupun non opersional dan biaya pajak ((jika ada) serta pendapatan yang berasal dari aktivitas penjualan.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan ini menjelaskan / mengungkapkan secara umum entitas dan memberikan penjelasan terkait informasi tambahan ada dalam laporan keuangan.

4. Konsep dan Prinsip Pervasif

1. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Pervasif

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam ED SAK EMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam ED SAK EMKM untuk transaksi atau peristiwa lain, maka entitas mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban.

2. Asumsi Dasar

1) Dasar Akrual

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika

memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut.

2) Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan ED SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

3) Konsep Entitas Bisnis

Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya. [21]

c. Pengakuan dalam Laporan Keuangan

1) Aset

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah

[21] Ikatan Akuntan Indonesia, *STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016).

terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2) Liabilitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

3) Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4) Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d. Saling Hapus

Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh ED SAK EMKM. Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangkan hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat aset tetap dan beban penjualan terkait.